

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam suatu negara yang menganut paham demokrasi, kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyatnya. Rakyat memiliki hak untuk memilih dan menentukan siapa-siapa saja orang yang akan menjadi pemimpinnya, yang nantinya para pemimpin tersebutlah yang membuat kebijakan-kebijakan publik. Disisi lain mereka juga memiliki hak untuk terlibat aktif untuk menjadi kontestan politik itu sendiri (hak dipilih). Huntington; Schmitter & Karl; Diamond sebagaimana dikutip oleh Leo Agustino dan Muhammad Agus Yusof menjelaskan bahwa hak memilih dan dipilih ini bahkan menjadi salah satu indikator pembeda antara sistem demokrasi dan sistem lain yang dianggap bukan demokrasi.<sup>1</sup> Kedua hak inilah yang kemudian terangkum dan terlaksana dalam sebuah proses dan prosedur yang disebut dengan Pemilihan Umum atau Pemilu.

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk perwujudan demokrasi prosedural. Sebagaimana disebutkan oleh P. Huntington bahwa prosedur utama demokrasi adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat yang akan mereka pimpin.<sup>2</sup> Gambaran ideal dan maksimal bagi suatu pemerintahan demokrasi di era modern saat ini adalah terbentuknya sebuah pemerintahan

---

<sup>1</sup> Leo Agustinus dan Muhammad Agus Yusoff. 2009. Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih: Analisis Pemilihan Presiden 2009 di Indonesia. *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan Vol. 5 No. 1*. Hlm 415

<sup>2</sup> A.A. Sahid Gatara. 2009. *Ilmu Politik: Memahami dan Menerapkan*. Bandung: Pustaka Setia. Hlm 207

perwakilan (*representative government*).<sup>3</sup> Pemerintahan perwakilan tersebut dibentuk melalui pemilu yang merupakan prosedur praktik politik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Selain sebagai prosedur demokrasi, pemilu juga digunakan sebagai sarana untuk membentuk kekuasaan yang berdasarkan kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh konstitusi dan Undang-Undang Dasar Negara.

Indonesia mulai memberlakukan Pemilihan Kepala Daerah atau yang biasa disebut Pilkada secara langsung setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 mengenai Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah. Kedua produk perundangan tersebut merupakan tonggak baru penegakkan kedaulatan rakyat Indonesia ditingkat daerah. Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Pilkada Langsung) adalah bagian dari eksese demokratisasi yang terjadi pasca reformasi 1998.<sup>4</sup> Pendulum kekuasaan yang selama ini berada pada pemerintah pusat dan pelaksanaannya cenderung semau sendiri atas nama kepentingan pusat, mulai bergeser kepada pemerintah daerah seiring dengan munculnya desentralisasi pemerintahan. Pada 27 Juni 2018 telah terlaksana pilkada atau pesta demokrasi serentak diseluruh wilayah Indonesia. Terdapat 171 daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2018, 171 daerah tersebut terdiri dari 17 Provinsi, 39 Kota, dan 115 Kabupaten.

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak pada 27 Juni 2018 yang lalu. Pilkada Kabupaten Tegal pada

---

<sup>3</sup> Robert A. Dahl. 1992. *Demokrasi dan Para Pengkritiknya diterjemahkan oleh A. Rahman Zainuddin*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hlm 17

<sup>4</sup> Dzunuwanus Ghulam Manar. 2014. *Pilkada Langsung dan Rekonstruksi Demokrasi Indonesia. Majalah Pengembangan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 41 No. 1*. Universitas Diponegoro. Hlm 6.

awalnya diikuti oleh tiga pasang calon bupati dan wakil bupati. Tiga pasangan calon tersebut adalah (1) Rusbandi-Fatkhudin yang diusung oleh koalisi partai Golkar dan PPP, (2) Haron Bagas Prakoso-Drajat yang diusung oleh koalisi partai PDIP, Nasdem, dan Demokrat, serta pasangan petahana (3) Enthus Susmono-Umi Azizah yang diusung oleh partai PKB, dan didukung oleh partai Gerindra, PKS, PAN, dan Hanura.

Pilkada Kabupaten Tegal tahun 2018 sangat menarik untuk diteliti karena terjadi berbagai hal yang tak diduga. Selain persaingan diantara paslon yang cukup ketat, empat puluh enam hari sebelum hari pencoblosan, tepatnya pada tanggal 14 Mei 2018 pukul 19.01 WIB, Calon Bupati nomor urut 3 yaitu Enthus Susmono dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Dr. Soesilo Slawi.<sup>5</sup> Enthus Susmono meninggal karena mengalami serangan jantung setelah menghadiri acara pengajian dan akhirussanah di Desa Sumbarang, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 dan Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017, jika ada salah satu pasangan calon yang sedang berhalangan tetap, dalam hal ini meninggal dunia, maka partai politik pengusung atau gabungan partai politik pengusung dapat mengajukan pasangan pengganti maksimal tujuh hari setelah meninggalnya sang calon. Selama masa pencarian pengganti Enthus, ada beberapa nama yang masuk menjadi pertimbangan PKB. Diantaranya dr. Edi Utomo, mantan calon Bupati pada Pilkada Tegal tahun 2013, KH. Was'ari, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tegal yang juga menjabat sebagai Ketua PCNU Kabupaten Tegal, dr. Widodo Joko Mulyono yang menjabat sebagai Sekda

---

<sup>5</sup> <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4020538/ki-enthus-susmono-meninggal-akibat-serangan-jantung> diakses pada 15 juni 2018 pukul 16.10 WIB

Kabupaten Tegal, H. Romli Wakil Bendahara PCNU Kabupaten Tegal, dan Sabilillah Ardie putra pertama dari Bachrudin Nasori politikus senior PKB.

Dari berbagai nama yang masuk, pada tanggal 18 Mei 2018, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kabupaten Tegal, berdasarkan pertimbangan dari Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Tegal akhirnya menentukan pilihan terhadap Sabilillah Ardie BSc. Namun, Sabilillah Ardie tidak akan mengisi posisi yang ditinggalkan Enthus sebagai calon bupati. Dia akan maju sebagai calon wakil bupati mendampingi Umi Azizah yang naik menjadi Calon Bupati. Menurut Sekretaris PKB Kabupaten Tegal, Agus Salim, pertimbangan memilih nama Sabilillah Ardie selain karena didasari tenggang waktu yang diberikan KPU untuk memilih pengganti sangat singkat<sup>6</sup>, Sabilillah Ardie juga dinilai sebagai kandidat yang pantas untuk mendampingi Umi Azizah dalam memenangkan Pilkada Kabupaten Tegal tahun 2018 karena usianya yang masih muda sehingga semangatnya mampu mewakili kaum milenial dalam membangun Kabupaten Tegal.

Terpilihnya Sabilillah Ardie sebagai pengganti Ki Ethus ini cukup menarik, mengingat Sabilillah Ardie dapat dikatakan sebagai orang baru yang belum memiliki nama sebesar Ki Enthus dalam dunia perpolitikan di Kabupaten Tegal. Sabilillah Ardie merupakan mantan Staff Khusus Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Helmy Faishal Zaini, pada masa Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II (2009-2014). Setelah tahun 2014 Ardie fokus mengembangkan perusahaannya diantaranya PT. Mega Kapital Utama dan PT. Barari Utama Global. Selain sibuk

---

<sup>6</sup> <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4027001/umi-gantikan-ki-enthus-sabilillah-ardie-dipilih-jadi-cawabup-tegal> diakses pada tanggal 15 juni 2018 pukul 17.50 WIB

berkarier, Ia juga menjabat sebagai Wakil Bendahara Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama (LazizNU) dan Lembaga Perekonomian PBNU. Umi Azizah dan Sabilillah Ardie resmi mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati ke KPUD Kabupaten Tegal pada hari Minggu, 20 Mei 2018, beberapa jam sebelum pendaftaran calon pengganti ditutup.

Meninggalnya Enthus Susmono atau yang biasa disapa Ki Enthus sempat membuat partai pengusung Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 ini kebingungan mencari sosok yang tepat untuk menggantikannya. Sebab hal ini dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap dukungan suara yang diberikan pasangan calon Bupati dan Wakil yang mereka usung. Sebagaimana pendapat Asshiddiqie bahwa masyarakat Indonesia masih dipengaruhi oleh kultur *paternalistic*, ketokohan atau figur seseorang.<sup>7</sup> Seperti yang diketahui bahwa salah satu hal yang menjadikan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor 3 unggul dalam Pilkada ini selain kekuatan Enthus-Umi sebagai petahana adalah karena sosok Ki Enthus itu sendiri. Ki Enthus yang memiliki latar belakang sebagai dalang telah dikenal oleh masyarakat, bahkan bukan hanya di Kabupaten Tegal tetapi sudah dikenal hingga di kancah internasional. Disisi lain meskipun Ki Enthus berasal dari keluarga abangan, tetapi Ki Enthus selalu mampu membawa pertunjukan wayang menjadi media komunikasi dan dakwah secara efektif. Gayanya yang nyentrik, *nyeleneh* dan apa adanya, serta dinilai jujur dan dekat dengan masyarakat menjadi poin unggul Ki Enthus dalam Pilkada Kabupaten Tegal 2018 ini.

---

<sup>7</sup> Arif Sugiono. 2013. *Strategic Political Marketing; Strategi Memenangkan Setiap Pemilu (Pemilukada, Pilpres, Pemilihan Legislatif DPRD, DPR-RI, DPD) dengan Menempatkan Pemilih Sebagai Penentu Kemenangan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. Hlm 109

Namun kekhawatiran partai pengusung akan terjadinya perubahan jumlah dukungan suara pasca meninggalnya Ki Enthus sama sekali tidak terjadi. Setelah masa pemungutan suara, 27 juni 2018, pasangan Umi-Ardie dinyatakan menang telak dalam Pilkada Kabupaten Tegal 2018. Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPUD Kabupaten Tegal, pasangan calon nomor 3 ini menguasai suara di seluruh kecamatan di Kabupaten Tegal dengan perolehan 518.017 suara atau setara dengan 70.94%. Umi-Ardie unggul jauh dibandingkan dua lawannya yaitu Haron Bagas-Drajat yang memperoleh 148.000 suara (20.27%), dan Rusbandi-Fatchudin dengan perolehan 64.155 suara (8.79%). Adapun rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada Kabupaten Tegal 2018 sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Kabupaten Tegal Tahun 2018

<b>Nomor Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>	<b>Prosentase</b>
1.	H. Rusbandi – H.Fatchuddin, S.E.	64.155	8.79%
2.	Drs. H. Haron Bagas Prakosa, M.Hum - H. Drajat Adi Prayitno, S.Kom, MM.	148.000	20.27%
3.	Dra. Hj. Umi Azizah – Sabilillah Ardie, B.Sc.	518.017	70.94%
Suara Sah		730.172	
Suara Tidak Sah		39.727	
Suara Total		769.899	

Sumber: KPU Kabupaten Tegal Tahun 2018

Kemenangan Umi-Ardie di seluruh kecamatan di Kabupaten Tegal sangat menarik mengingat pasangan Umi-Ardie bukanlah pasangan yang semula didaftarkan ke KPU untuk maju pada Pilkada Kabupaten Tegal. Pasangan ini baru ditetapkan sekitar satu bulan menjelang pemungutan suara, namun demikian sukses mengungguli dua pasangan calon lainnya dengan kemenangan telak tanpa menggunakan *money politic*. Kemenangan Umi pada Pilkada 2018 ini juga jauh lebih tinggi daripada ketika menjadi calon wakil bupati bersama Enthus pada Pilkada Kabupaten Tegal 2013, saat itu Enthus-Umi hanya memperoleh 233.318 suara, atau setara dengan 35,21%.

Hal menarik lainnya adalah Umi Azizah merupakan perempuan daerah pertama yang terpilih menjadi seorang Bupati ditengah oase kepemimpinan kepala daerah perempuan di Kabupaten Tegal. Fakta tersebut kemudian menarik peneliti untuk mengarahkan fokus penelitian terhadap sosok Umi Azizah, mengingat Sabilillah Ardie belum memiliki popularitas yang tinggi di Kabupaten Tegal. Berbeda dengan Sabilillah Ardie, Umi Azizah bukan merupakan orang baru di Kabupaten Tegal. Ia merupakan putri dari pasangan KH. Zainal Arifin (Pendiri dan Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hikmah) dan Hj. Masyitoh, sejak kecil sudah terdidik dalam lingkungan agamis. Umi Azizah mengawali kiprahnya dengan mendedikasikan diri untuk masyarakat Tegal dengan aktif di organisasi perempuan Fatayat Nahdlatul Ulama (Fatayat NU). Beliau pernah menjadi Ketua PC Fatayat NU Kabupaten Tegal selama dua periode yaitu pada tahun 1987-1992 dan 1992-1997. Selama rentang tahun 2000-2005 Umi Azizah dipercaya untuk memimpin Yayasan Pendidikan Muslimat NU (YPM Muslimat NU) dan Ketua II Muslimat NU Kabupaten Tegal. Sebelum mendampingi Enthus Susmono sebagai Wakil

Bupati Tegal periode 2013-2018, ia juga sudah menjabat sebagai Ketua Muslimat NU Kabupaten Tegal sejak 2010 hingga sekarang.

Bourdieu yang memandang modal sosial dari perspektif aktor melihat modal sosial sebagai sumberdaya dimana seorang individu dapat menggunakannya karena kepemilikannya terhadap jaringan secara eksklusif.<sup>8</sup> Kepemilikan modal sosial berupa organisasi sosial, kedekatan, dan keterikatan dengan masyarakat sekitarnya lebih memudahkan seorang aktor untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat karena sudah lama mengenal dan terjalin hubungan timbal balik. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Indah Adi Putri juga menunjukkan bahwa modal sosial cukup berhasil dijadikan sebagai strategi bagi para caleg perempuan Sumatera Barat untuk memperoleh dukungan pada Pemilu Legislatif tahun 2014.<sup>9</sup> Dari penjelasan diatas peneliti melihat bahwa kepemilikan modal sosial adalah salah satu hal yang sangat penting bagi seorang kandidat dalam sebuah kontestasi politik. Pengalaman Umi Azizah yang telah berkecimpung diberbagai organisasi maupun institusi menarik peneliti untuk menganalisis dan meneliti lebih lanjut bagaimana kekuatan modal sosial yang dimiliki oleh Umi Azizah serta bagaimana modal sosial itu dimanfaatkan secara maksimal sehingga mampu memperoleh kemenangan telak pada Pilkada Kabupaten Tegal 2018.

---

<sup>8</sup> Pierre Bourdieu. 1986. *The Forms of Capital. Handbook of Theory of Reserch for the Sociology of Education*. Greendword Press. Hlm 22

<sup>9</sup> Indah Adi Putri. 2017. Jaringan Kekeabatan Matrilineal Sebagai Modal Sosial Perempuan Caleg dalam Pemilu 2014. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*. Desember 2017 Vol. 19 (2). Hlm 167-178



## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kondisi modal sosial yang dimiliki oleh Umi Azizah dalam mengikuti Pilkada Kabupaten Tegal tahun 2018?
2. Bagaimana Umi Azizah memanfaatkan modal sosial yang dimiliki secara optimal untuk memperoleh kemenangan pada Pilkada Kabupaten Tegal tahun 2018?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam mengenai modal sosial yang dimiliki oleh Umi Azizah serta mengetahui bagaimana upaya Umi Azizah dalam menggunakan modal sosial yang dimiliki secara optimal sehingga memperoleh kemenangan pada Pilkada Kabupaten Tegal tahun 2018.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian tentang peran modal sosial terhadap perolehan dukungan suara Umi Azizah pada kontestasi politik Pilkada Kabupaten Tegal tahun 2018 ini memiliki manfaat baik secara akademis dan juga manfaat praktis yang dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1.4.1. Kegunaan Akademis**

Secara akademis penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khasanah ilmu pengetahuan ilmu politik dan pemerintahan khususnya tentang Pilkada di Indonesia. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya yang lebih baru mengenai pemanfaatan modal sosial untuk memperoleh kemenangan dalam Pilkada.

#### 1.4.2. Kegunaan Praktis

Bagi penulis, manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan empirik mengenai rangkaian proses pelaksanaan pilkada terutama mengenai bagaimana cara membangun modal sosial yang baik diantara masyarakat serta bagaimana memanfaatkan modal sosial yang dimiliki untuk memperoleh kemenangan dalam proses Pilkada. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima sebagai kontribusi untuk memberikan masukan atau bahan pertimbangan mengenai strategi pengoptimalisasian modal sosial sebagai upaya memperoleh kemenangan dalam Pilkada.

#### 1.5. Penelitian Terdahulu

Peneliti telah melakukan penelusuran terhadap berbagai literatur tentang modal sosial dalam Pilkada dan peneliti menemukan bahwa belum ada penelitian yang membahas mengenai Modal Sosial dan Keterpilihan Pasangan Umi Azizah-Sabilillah Ardie Pada Pilkada Kabupaten Tegal Tahun 2018. Namun ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan dikaji dan telah menghasilkan kesimpulan yang beragam sesuai dengan kajian penelitiannya, yaitu:

Pertama, penelitian yang berjudul *Dynamics Of Social Capital and Recent Political Development In Malaysia* dengan nama peneliti Parnini Syeda Naushin, Othman, Amer Sai Fude.<sup>10</sup> Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana modal sosial dan TIK dimanfaatkan sebagai fasilitas untuk menaikkan gerakan partai

---

<sup>10</sup> Parnini Syeda Naushin, Othman, Amer Sai Fude. 2014. *Dynamics Of Social Capital and Recent Political Development In Malaysia*. *Japanese Journal Of Political Science*, 3 (15). Hlm 443-464

oposisi dengan menempatkan penggunaan modal sosial dalam konteks sosial politik yang lebih luas. Modal sosial pada dasarnya merupakan ruang publik yang otonom yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk bertukar pikiran dimana salah satu medianya adalah TIK, sehingga TIK diyakini mampu memberikan peluang untuk menjalin ikatan sosial yang baru dan memperluas pembentukan modal sosial. Dalam penelitian ini dikatakan bahwa kondisi politik di Malaysia telah menjadi kontroversi karena munculnya masyarakat sipil dengan berbagai budaya terhadap kelompok oposisi yang semakin kuat. Penelitian ini mencoba untuk mengelaborasi antara modal sosial dengan TIK, karena keduanya dianggap penting dan memiliki keterkaitan terhadap perubahan kondisi politik yang terjadi di Malaysia.

Fakta empiris menunjukkan bahwa modal sosial memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan partisipasi publik dan realisasi norma-norma demokrasi. Perkembangan teknologi seperti internet menjadi dasar dalam memahami dampak dari modal sosial diantara masyarakat dan perpolitikan, terutama di negara Malaysia. Modal sosial juga memberikan pengaruh terhadap peningkatan partisipasi politik, keterlibatan sipil, dan pemerintahan di Malaysia. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya organisasi non-pemerintah (LSM), oposisi yang semakin kuat dan dipercepat oleh keberadaan TIK khususnya internet, yang mana ini dianggap sebagai stimulus dalam mengubah lanskap politik di Malaysia.

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan I Gede Parguna Wisesa dengan judul Peranan Modal Sosial dalam Kemenangan Satono dari Jalur Independen pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Lampung Timur

Tahun 2010.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini dikatakan bahwa saat memutuskan untuk kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Lampung Timur di tahun 2010, Satono telah memiliki kunci awal yang sangat penting bagi seorang kandidat Calon Bupati yaitu popularitas. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten dan Bupati Lampung Timur sejak tahun 2005. Selama menjabat menjadi Bupati ia sering mendatangi acara yang diselenggarakan masyarakat, mulai dari acara pesta hingga santunan terhadap masyarakat yang sedang berduka karena tertimpa musibah. Satono juga berhasil menarik simpati masyarakat Lampung Timur melalui berbagai acara kesenian yang ia gelar. Masyarakat menganggap bahwa Satono telah menginvestasikan dirinya untuk benar-benar mengabdikan kepada masyarakat selama lima tahun terakhir, sehingga masyarakat sangat mendukung Satono untuk menjadi Bupati Lampung Timur pada periode selanjutnya. Meskipun sudah memperoleh dukungan dari masyarakat, Satono tetap bekerja keras untuk memasarkan dirinya dengan mengampanyekan keberhasilan pembangunan Lampung Timur ketika ada dibawah kepemimpinannya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa modal sosial yang dimiliki seperti *trust* (kepercayaan masyarakat) yang berasal dari ketokohan Satono dan juga kelihaihan strategi memasarkan diri untuk mendapat *social networking* (jaringan masyarakat) sangat berpengaruh terhadap kemenangan Satono melalui jalur independen pada Pilkada Lampung Timur tahun 2010.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Indah Adi Putri dengan judul Jaringan Kekerabatan Matrilineal Sebagai Modal Sosial Perempuan Caleg Dalam Pemilu

---

<sup>11</sup> I Gede Parguna Wisesa. 2014. Peranan Modal Sosial dalam Kemenangan Satono dari Jalur Independen pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010. *Journal of Politic and Government Studies*, Vol. 3 No. 3. Hlm 5-8

2014.<sup>12</sup> Penelitian yang dilakukan terhadap tiga orang caleg perempuan yang mencalonkan diri menjadi DPRD dari Sumatera Barat (dua diantaranya adalah petahana) ini sangat menonjolkan isu budaya dan unsur-unsur budaya tersebut dikemas secara menarik. Dalam penelitian ini dikatakan bahwa di daerah Minangkabau terdapat sebuah sistem yang dianut oleh masyarakatnya, yaitu sistem kekerabatan matrilineal, dimana ninik mamak dan bundo kanduang memiliki peranan besar dalam kaum. Sistem kekerabatan atau jaringan matrilineal ini kemudian dimanfaatkan oleh perempuan-perempuan di Minangkabau untuk mencalonkan diri sebagai caleg pada Pemilihan Umum tahun 2014. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa modal sosial cukup berhasil digunakan oleh bagi para caleg perempuan Sumatera Barat untuk mendulang suara pada Pemilu Legislatif tahun 2014.

Meskipun penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian-penelitian sebelumnya tetapi terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya diantaranya adalah beberapa penelitian yang sudah dijelaskan diatas mengkaji pengaruh modal sosial terhadap tingkat partisipasi politik dan pengaruh modal sosial terhadap kemenangan seorang kandidat serta menyandingkannya dengan berbagai aspek lain seperti teknologi informasi dan budaya. Sedangkan penelitian ini secara spesifik memfokuskan penelitian pada satu aspek yaitu modal sosial sebagai jaringan sosial yang dimainkan oleh aktor. Melalui perspektif aktor ini peneliti ingin melihat bagaimana kekuatan modal sosial yang dimiliki oleh Umi Azizah kemudian dimanfaatkan dan diberdayakan secara optimal untuk memperoleh kemenangan pada Pilkada Kabupaten Tegal tahun 2018.

---

<sup>12</sup> Indah Adi Putri, Loc.Cit.

## 1.6. Kerangka Teori

### 1.6.1. Modalitas dalam Kontestasi Politik

Pilkada merupakan proses demokrasi secara prosedural dan substansial dengan cara memilih orang untuk menjadi pemimpin maupun wakil rakyat dan kemenangannya ditentukan oleh suara terbanyak. Dalam sistem politik demokrasi setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih atau mencalonkan diri sebagai kepala daerah dengan jaminan kebebasan, baik untuk membentuk organisasi-organisasi politik, menyampaikan aspirasi politik, maupun ikut bersaing dalam kompetisi pemilihan penempatan jabatan-jabatan publik tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dunia politik memang tidak pernah bisa terlepas dari kompetisi atau persaingan. Firmanzah mengungkapkan bahwa esensi persaingan dalam dunia politik mengandung maksud untuk memperebutkan dukungan dan pengaruh.<sup>13</sup> Dengan memperoleh dukungan maka seorang individu atau kelompok akan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kehidupan didalam masyarakat.

Teori mengenai modal pertama kali dicetuskan oleh Pierre Bourdieu. Teori modal ini dianggap memiliki hubungan yang erat dengan persoalan kekuasaan. Oleh karena itu pemikiran Bourdieu terkonstruksi atas persoalan dominasi. Persoalan dominasi tentu menjadi persoalan utama dalam masyarakat politik sebagai bentuk aktualisasi kekuasaan. Pada hakikatnya dominasi yang dimaksud tergantung atas situasi, sumberdaya (kapital), dan strategi pelaku.<sup>14</sup> Artinya bahwa meskipun secara konstitusional setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing dalam kontestasi politik, tetapi dalam tataran empiris, kesempatan itu sebenarnya

---

<sup>13</sup> Firmanzah. 2008. *Mengelola Partai Politik; Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hlm 147

<sup>14</sup> Abdul Halim. 2014. *Politik Lokal: Pola, Aktor & Alur Dramatikalnya*. Yogyakarta : LP2B. Hlm 108.

berbeda antara satu dengan yang lain karena modal yang dimiliki setiap orang dalam kontestasi pemilu secara langsung pada kenyataannya berbeda-beda.<sup>15</sup>

Konsepsi teori modal yang dicetuskan oleh Bourdieu tidak dapat dilepaskan dari konsep dominasi lainnya. Dalam hal ini teori modal berkaitan dengan konsep kekuasaan yang lain yaitu habitus dan ranah (arena). Habitus merupakan produk sejarah yang terbentuk setelah manusia lahir dan berinteraksi dengan masyarakat dalam ruang dan waktu tertentu. Habitus bukan bawaan alamiah atau kodrat tetapi merupakan hasil pembelajaran lewat melalui pengasuhan dan bersosialisasi dalam masyarakat. Proses pembelajarannya sangat halus, tak disadari dan tampil sebagai hal yang wajar.<sup>16</sup> Sementara itu, ranah oleh Bourdieu diartikan sebagai jaringan relasi antar posisi-posisi objektif dalam suatu tatanan sosial yang hadir terpisah dari kesadaran dan kehendak individual. Arena dapat dianalogikan sebagai tempat perjuangan atau pertempuran, disebut demikian karena arena dalam strukturnya menopang dan mengarahkan strategi yang digunakan oleh orang-orang yang menduduki posisi ini untuk berupaya, baik individu maupun kolektif mengamankan, atau meningkatkan posisi kekuasaan, dan menerapkan prinsip hierarkisasi yang paling relevan.<sup>17</sup>

Dialektika konsep habitus dan arena memunculkan beberapa pandangan bahwa didalam sebuah arena terdapat kegiatan yang bisa dikatakan sama halnya dengan pasar kompetitif yang melahirkan konsep modal dalam strateginya.

---

<sup>15</sup> Stella M.I Pantouw. 2012. Modalitas dalam kontestasi politik (Studi Tentang Modalitas dalam Kemenangan Pasangan Hanny Sondakh dan Maximiliaan Lomban Pada Pemilu di Kota Bitung Sulawesi Utara Tahun 2010). *Tesis Program Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro*. Hlm 13.

<sup>16</sup> Richard Harker, dkk. 2009. *(Habitus X Modal) + Ranah= Praktik: Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*. Yogyakarta: Jalasutra. Hlm 28-29

<sup>17</sup> George Ritzer & Douglas J. Goodman. 2009. *Teori Sosiologi; Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Yogyakarta: Kreasi wacana. Hlm 581-583

Dialektika habitus, modal, dan ranah juga melahirkan praktik sosial. Pada saat yang sama pula habitus dan ranah menjadi produk dari medan daya-daya yang ada dimasyarakat. Dalam suatu ranah ada pertarungan, kekuatan-kekuatan antara orang yang memiliki banyak modal dan orang yang tidak memiliki modal. Setiap ranah menuntut adanya modal-modal khusus yang dimiliki agar seorang individu atau kelompok dapat hidup secara baik dan bertahan didalamnya.

Pierre Bourdieu dalam tulisannya yang berjudul *The Forms of Capital* membedakan modalitas menjadi tiga bentuk yakni : (1) Modal ekonomi, yang mencakup alat-alat produksi (mesin, tanah, buruh), materi baik itu pendapatan ataupun benda-benda, dan uang. (2) Modal budaya, yakni keseluruhan kualifikasi intelektual yang dapat diproduksi melalui pendidikan formal maupun warisan keluarga. (3) Modal sosial yang berupa kewajiban sosial (jaringan).<sup>18</sup> Setiap modal dalam konsep Pierre Bourdieu saling berkaitan satu sama lain dan bisa mengalami transformasi atau konversi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Bourdieu mengungkapkan bahwa modal ekonomi memang dapat dengan mudah dikonversikan kedalam bentuk uang dan dapat dilembagakan dalam bentuk hak kepemilikan, tetapi dalam kondisi tertentu modal budaya juga dapat dikonversikan menjadi modal yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dilembagakan seperti kualifikasi pendidikan. Begitu juga dengan modal sosial, dalam kondisi tertentu dapat dikonversikan kedalam modal ekonomi dan bahkan dapat dilembagakan seperti dalam bentuk gelar kesarjanaan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Pierre Bourdieu, Op.Cit., Hlm 16

<sup>19</sup> Rusdi Syahra. 2003 Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*. Vol. 5 No. 1. Hlm 2-3



Modal menjadi instrumen yang sangat penting dalam sebuah kontestasi politik, utamanya dalam memperoleh kekuasaan politik. Strategi pemenangan yang digunakan dalam kontestasi Pilkada tidak hanya menyesuaikan dengan kondisi Pilkada dan arena kompetisinya saja, tetapi juga termasuk didalamnya adalah kepemilikan modal setiap kandidat, siapapun yang memiliki modal yang lebih kuat maka ia akan berpeluang lebih besar untuk memenangkan pilkada tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti lebih fokus untuk meneliti salah satu dari sekian banyak bentuk modal yaitu modal sosial. Fenomena pemanfaatan hubungan dan jaringan yang kandidat atau aktor lakukan untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan melalui Pilkada menjadi hal yang menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini.

### **1.6.2. Modal Sosial**

Konsep modal sosial lahir karena adanya pemikiran bahwa suatu anggota masyarakat tidak mungkin mampu hidup sendiri, dan menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Harus ada kebersamaan dan kerjasama yang baik diantara setiap anggota masyarakat yang memiliki kepentingan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pemikiran mengenai modal sosial pertama kali muncul tahun 1916 oleh pemikiran Lyda Judson Hanifan, yang mengatakan bahwa modal sosial bukanlah modal dalam arti biasa seperti harta kekayaan atau uang, tetapi lebih mengandung arti kiasan, namun merupakan aset atau modal nyata yang penting dalam hidup bermasyarakat.<sup>20</sup> Kemauan baik, rasa bersahabat, saling simpati, serta hubungan sosial dan kerjasama yang erat antara individu dan keluarga

---

<sup>20</sup> Ibid.,

yang membentuk suatu kelompok sosial itu dapat dimasukkan kedalam kategori modal sosial.

Beberapa ahli juga menyampaikan pandangan berbeda mengenai modal sosial, tetapi pandangan-pandangan dari para ahli ini memiliki korelasi seperti yang dapat dicermati sebagai berikut:

- a. Robert Putnam menekankan bahwa modal sosial adalah suatu nilai tentang *mutual trust* (kepercayaan timbal balik) antara anggota masyarakat maupun masyarakat terhadap pemimpinnya. Putnam melihat modal sosial sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan (*networks*), norma-norma (*norms*), dan kepercayaan sosial (*social trust*) yang mendorong kepada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama.<sup>21</sup> Pendapat ini mengandung pengertian bahwa diperlukan adanya ikatan/jaringan sosial yang ada dalam masyarakat dan norma yang mendorong produktivitas komunitas.
- b. James Coleman melihat modal sosial sebagai sesuatu yang diarahkan atau diciptakan untuk memudahkan tindakan individu dalam struktur sosialnya.<sup>22</sup> Coleman memberikan penekanan terhadap dua aspek struktur yang sangat penting yaitu (1) aspek dari struktur sosial yang menciptakan pengungkungan dalam sebuah jaringan yang membuat orang saling berhubungan sehingga kewajiban dan sanksi dapat dikenakan pada setiap orang menjadi anggota jaringan tersebut. (2) adanya organisasi sosial yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan bersama. Teori modal sosial

---

<sup>21</sup> Robert Putnam. 1993. *Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press. Hlm 36

<sup>22</sup> Coleman, J.S. 1988. Social Capital in the Creation of Human Capital. *American Journal of Sociology* 94, pp 995-1020. The University of Chicago Press. Hlm 4

menurut Coleman juga menyatakan bahwa kepercayaan dan kerja sama dapat mengurangi biaya transaksi dan memungkinkan pertukaran sumber daya yang cepat dan mudah.<sup>23</sup>

- c. Francis Fukuyama menggunakan konsep kepercayaan untuk mengukur tingkat modal sosial. Fukuyama melihat bahwa kondisi kesejahteraan dan demokrasi serta daya saing suatu masyarakat ditentukan oleh tingkat kepercayaan antara sesama anggota masyarakat.<sup>24</sup> Unsur kepercayaan menjadi hal yang paling penting dalam konsep modal sosial, karena menurut Fukuyama masyarakat dengan tingkat kepercayaan yang tinggi cenderung akan lebih sukses dalam mencapai tujuannya. Sebaliknya, ketika masyarakat memiliki sikap saling curiga, merasa cemburu satu sama lain, merupakan indikasi rendahnya tingkat kepercayaan didalam masyarakat tersebut. Dalam konteks Pilkada, dapat dianalogikan jika calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah memiliki kepercayaan yang tinggi dari masyarakat, maka ia akan berpeluang lebih besar untuk memenangkan Pilkada. Sebaliknya, jika calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah tidak memiliki kepercayaan dari masyarakat, maka ia akan sulit memenangkan Pilkada. Walaupun terpilih tetapi tidak berdasarkan modal sosial atau kepercayaan yang tinggi dari masyarakat, ia akan kesulitan dalam mewujudkan visi dan misinya.

---

<sup>23</sup> Hans-Georg Wolff and Sowon Kim. 2012. The Relationship between Networking Behaviors and The Big Five Personality Dimensions. *Career Development International*. Vol 17 No.1, pp. 43-66. Hlm 48

<sup>24</sup> Fukuyama, Francis. 1995. *Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity*. New York: Free Press Paperback. Hlm 16

d. Pierre Bourdieu mendefinisikan modal sosial sebagai kumpulan sumber daya aktual atau potensial yang dimiliki seseorang terkait dengan kepemilikan jaringan yang terlembagakan dan bertahan lama dalam bentuk pengenalan dan pengakuan bersama (atau dengan kata lain : keanggotaan dalam kelompok sosial) yang memberikan setiap anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif.<sup>25</sup> Bourdieu berpendapat bahwa modal sosial merupakan aset individual seorang aktor, yang kemudian berkembang menjadi aset kelompok. Besaran modal sosial yang dimiliki oleh seseorang bergantung pada ukuran koneksi jaringan yang dapat dimobilisasi secara efektif dan bergantung pada besaran modal (ekonomi, budaya atau simbolik) yang dimiliki oleh orang yang menjadi koneksinya. Modal sosial dalam konsep Bourdieu mengacu pada keuntungan dan kesempatan yang didapatkan seseorang di dalam masyarakat melalui keanggotaannya dalam kelompok atau entitas sosial tertentu. Untuk memproduksi ulang atau memelihara modal sosial yang dimiliki perlu dilakukan upaya sosialisasi yang berlangsung secara terus menerus, dengan begitu modal sosial akan menjadi kuat, lebih kuat lagi dan memperoleh pengakuan tanpa akhir.<sup>26</sup>

Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat dilihat terdapat perbedaan yang mendasar dimana Bourdieu bersama dengan Coleman membawa konsep modal sosial sebagai konstruksi utama teori mikro-sosiologi yaitu jaringan sosial dan tindakan manusia, sedangkan Putnam dan Fukuyama membawa konsep modal

---

<sup>25</sup> Pierre Bourdieu, Op.Cit., Hlm 21

<sup>26</sup> Ibid., Hlm 22-23

sosial ke arah teori makro-sosiologi yaitu struktur masyarakat dan budaya. Latar belakang sosial yang dimiliki calon bisa dicermati seperti tingkat pendidikan, pekerjaan awal, ketokohnya di dalam masyarakat (tokoh agama, tokoh adat, organisasi kepemudaan, profesi dan lain sebagainya) merupakan modal sosial yang harus dimiliki kandidat berkaitan dengan membangun relasi dan kepercayaan dari masyarakat sebab kekuasaan juga diperoleh karena kepercayaan.<sup>27</sup>

Modal sosial memiliki makna yang sangat penting, bahkan tidak kalah pentingnya dengan modal politik maupun modal ekonomi. Melalui modal sosial yang dimiliki, kandidat tidak hanya akan dikenal oleh pemilih tetapi melalui pengenalan tersebut, apalagi pengenalan dengan interaksi secara fisik dan sosial yang berjarak dekat akan membuat pemilih dapat menilai apakah seorang kandidat layak dipilih atau tidak. Sehingga seorang calon pejabat publik dapat dikatakan memiliki modal sosial ketika ia tidak hanya dikenal oleh masyarakat tetapi juga mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori modal sosial Pierre Bourdieu untuk melihat dari perspektif aktor mengenai bagaimana bentuk modal sosial yang dimiliki serta pemanfaatan yang dilakukan oleh Umi Azizah sehingga berhasil mendapatkan dukungan dari masyarakat pada Pilkada Kabupaten Tegal tahun 2018.

---

<sup>27</sup> Tawakkal Baharudin. 2017. *Modalitas dalam Pemilukada: Bupati Perempuan Pertama di Sulawesi Selatan*. Lampung: Gre Publishing. Hlm 33-34

## **1.7. Operasionalisasi Konsep**

### **1.7.1. Konsep Utama Penelitian**

1. Modal sosial merupakan sumberdaya jaringan yang dimiliki oleh seseorang melalui pola-pola hubungan antar individu dalam entitas sosial tertentu yang memberikan keuntungan berupa dukungan kolektif yang dapat digunakan sebagai investasi dalam mencapai tujuan bersama atau mendapatkan sumberdaya baru.
2. Pemanfaatan modal sosial merupakan suatu strategi atau cara yang dilakukan oleh seorang aktor dengan menggunakan modal sosial sebagai sarana untuk memperoleh dukungan dan kepercayaan dari masyarakat dalam kegiatan kontestasi politik.

### **1.7.2. Indikator atau Fenomena Penelitian**

1. Analisis kekuatan modal sosial.
  - a. Adanya jaringan sosial yang dapat dimobilisasi.
2. Pemanfaatan modal sosial untuk memperoleh kemenangan.
  - a. Adanya interaksi sosial.
3. Hasil pemanfaatan modal sosial.
  - a. Adanya dukungan dan kepercayaan dari masyarakat.

## **1.8. Metode Penelitian**

### **1.8.1. Desain Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami

oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>28</sup>

Penelitian ini akan menggali secara mendalam mengenai modal sosial yang dimiliki oleh Umi Azizah. Peneliti mencoba mengumpulkan data dan informasi agar fenomena kemenangan pasangan Umi-Ardie pada Pilkada Kabupaten Tegal 2018 yang berkaitan dengan pemanfaatan jaringan sosial atau modal sosial dapat dideskripsikan secara jelas dalam penelitian ini.

### **1.8.2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tegal. Lokasi tersebut dipilih sesuai dengan tempat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang akan diteliti.

### **1.8.3. Subjek Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, yang dimaksud dengan subjek penelitian adalah individu dan kelompok yang mampu memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti untuk melakukan penelitian.<sup>29</sup> Penelitian tentang Modal Sosial dan Keterpilihan Umi Azizah Pada Pilkada Kabupaten Tegal Tahun 2018 mengambil subjek penelitian sebagai berikut:

1. Umi Azizah sebagai Bupati Tegal periode 2019-2024
2. Sabilillah Ardie sebagai Wakil Bupati Tegal periode 2019-2024
3. DPC PKB Kabupaten Tegal sebagai partai pengusung pasangan Umi-Ardie
4. Tim Sukses Pasangan Umi Azizah-Sabilillah Ardie.

---

<sup>28</sup> Lexy J Moleong. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hlm 6

<sup>29</sup> Suhersimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm 145

5. Pimpinan PCNU Kabupaten Tegal, PC Muslimat NU, PC Fatayat NU, dan Pimpinan Rabithah Ma'ahid Islamiyah sebagai jaringan sosial Umi Azizah.
6. Beberapa konstituen atau masyarakat yang memiliki hak pilih pada Pilkada Kabupaten Tegal tahun 2018.

#### **1.8.4. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini berupa kata-kata tertulis, dan sebagian berupa angka. Adapun sumber data yang membantu penelitian ini berupa:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang diteliti. Untuk mendapatkan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara secara langsung dilakukan untuk mendapatkan informasi secara mendalam dengan mengacu pada panduan wawancara (*interview guide*) yang telah dirumuskan sebelumnya.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang dari data primer yang diperoleh melalui perantara atau pihak lain. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dari buku referensi, jurnal, dan studi literatur lainnya yang sesuai dengan objek kajian penelitian dan permasalahan, yang dalam hal ini adalah mengenai pemanfaatan modal sosial yang dimiliki Umi Azizah untuk memperoleh kemenangan pada Pilkada Kabupaten Tegal tahun 2018 yang nantinya dijadikan panduan dalam melakukan penelitian.

#### **1.8.5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada pelaksanaan penelitian ini adalah:



#### 1.8.5.1. Wawancara

Moleong mengungkapkan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.<sup>30</sup> Suatu percakapan dapat dikatakan wawancara apabila percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Metode wawancara diharapkan dapat digunakan untuk memperoleh data primer yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### 1.8.5.2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara mencari informasi dari catatan atau data yang sesuai dengan topik penelitian melalui dokumen yang tertulis. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dokumen yang berupa arsip data, foto, ataupun dokumen lain yang berkaitan dengan modal sosial yang dimiliki Umi Azizah dan upaya memperoleh kemenangan pada Pilkada Kabupaten Tegal 2018 melalui optimalisasi modal sosial yang dimiliki.

### **1.8.6. Pengolahan Data**

Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan kegiatan-kegiatan berikut:

#### 1. Recording

Recording merupakan proses merekam, mendokumentasikan dan menyimpan semua data yang diperoleh di lapangan, baik merekam semua

---

<sup>30</sup> Lexy J Moleong, Op.Cit., Hlm 186

kejadian dan fakta yang ada, serta mencatat sebagian ataupun dengan mengingat kejadian di lapangan yang berhubungan dengan objek penelitian.

## 2. Editing

Editing adalah proses memeriksa data yang diperoleh untuk menjamin ketepatan data tersebut, pemeriksaan dilakukan apabila ada kesalahan yang terletak pada penulisan dapat diperiksa kembali.

## 3. Presenting

Presenting yaitu mempersembahkan atau menampilkan data-data yang telah diperoleh dan diperiksa untuk lebih mempermudah dalam penyusunan dan penyajian data.

### **1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data**

Analisis data menurut Bodgan dan Biklen adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>31</sup> Analisis dan interpretasi data menurut Moleong terdiri dari telaah data, reduksi data, *koding*, dan memeriksa keabsahan data.<sup>32</sup> Penjelasan dari tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut:

#### 1. Telaah Data

Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan lain sebagainya.

---

<sup>31</sup> Ibid., Hlm 248

<sup>32</sup> Ibid., Hlm 247

## 2. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan cara melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya.

## 3. Koding

Langkah berikutnya setelah melakukan reduksi data adalah menyusunnya dalam satuan-satuan. Satuan-satuan itu kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Kategori-kategori itu dibuat sambil melakukan koding.

## 4. Keabsahan Data

Setelah melakukan beberapa tahapan sebelumnya, langkah terakhir adalah menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan tergantung pada kasarnya kumpulan catatan-catatan dilapangan. Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Pendekatan kualitatif ini berusaha mengungkapkan kenyataan sosial secara keseluruhan, utuh, dan tuntas sebagai satu kesatuan kenyataan, objek penelitian dilihat sebagai kenyataan hidup yang dinamis, memiliki pikiran dan perasaan serta subjektivitas yang unik sehingga data yang diperoleh tidak harus berupa angka-angka atau data-data yang bisa diungkapkan, tetapi lebih banyak deskripsi, ungkapan atau makna-makna tertentu yang harus diungkapkan peneliti.